

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

9

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
							<input checked="" type="checkbox"/>						

Realisasi PAD Lambar Masih 38,85 Persen

REALISASI pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Lampung Barat tahun 2021 hingga akhir Juni lalu baru 38,85% atau Rp27,342 miliar dari target Rp70,377 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lambar Okmal, Minggu (11/7), mengatakan realisasi target PAD itu bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Ia mengakui jumlah realisasi Rp27,342 miliar itu merupakan angka keseluruhan yang sifatnya masih sementara sampai Juni atau pertengahan tahun anggaran. Berdasarkan hasil rekapitulasi bahwa angka perolehan PAD sampai Juni yang baru mencapai Rp27,34 miliar tersebut, diakui itu belum mencapai angka ideal (50%). Hal itu disebabkan ada beberapa OPD yang pencapaian targetnya belum maksimal.

Realisasi PAD Rp27,34 miliar itu terdiri atas realisasi PAD yang bersumber dari hasil pajak daerah, yaitu baru tercapai Rp4,2 miliar (35,58%) dari target Rp11,9 miliar. Hal itu terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak pe-

nerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selanjutnya, PAD yang bersumber dari retribusi daerah tercapai Rp1,6 miliar (28,40%) dengan target Rp5,9 miliar. Retribusi daerah itu meliputi retribusi jasa umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan sebagainya.

Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp5,9 miliar (105,75%) dari target Rp5,6 miliar, yaitu berupa bagian laba atas penyertaan modal. Kemudian, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi Rp15 miliar (33,2%) dari target Rp46 miliar dan sebagainya.

Sesuai hasil rekapitulasi perolehan PAD per OPD pengelola, dapat dipastikan masih ada beberapa yang sampai dengan Juni lalu realisasinya belum mencapai target standar minimal 50%. (EL/O')